

**ANALISIS PENYEBAB PENGECCUALIAN BUKAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN KAITANNYA DENGAN ASAS KECERMATAN (STUDI KASUS YAYASAN PIUS PURWOREJO)**

Oleh

**Delvita Denny Cung<sup>1</sup>, Anugrah Anditya<sup>2</sup>**

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab indikator pengecualian bukan objek PBB P2 tidak diterapkan terhadap Yayasan Pius Purworejo oleh BPPKAD Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 dan untuk mengetahui penerapan asas kecermatan oleh BPPKAD Kabupaten Purworejo dalam penerbitan SPPT PBB P2 tahun 2018.

Penelitian ini bersifat normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian didukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dilengkapi dengan data primer yang berasal dari narasumber dan responden. Kedua jenis data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode deskriptif guna mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab indikator pengecualian bukan objek PBB P2 tidak diterapkan terhadap Yayasan Pius Purworejo karena pada masa transisi PBB P2 KPP Pratama tidak memberikan data manual dan data digital kepada BPPKAD. Dengan demikian BPPKAD melakukan pendataan aktif yang mana pada pendataan tersebut tidak diperoleh data sebagaimana yang diperlukan. Pendataan aktif tidak terlaksana dengan baik karena permohonan BPPKAD untuk mendapatkan data berupa Anggaran Dasar tidak tersampaikan kepada Yayasan. Asas kecermatan tidak sepenuhnya diterapkan dalam proses penerbitan SPPT PBB P2. Hal ini bukan sepenuhnya kesalahan BPPKAD mengingat tidak ada juklak atau juklis yang mengatur koordinasi BPPKAD dengan kelurahan. Tidak ada peraturan yang mengatur bahwa BPPKAD harus melakukan pemantauan terhadap penyampaian informasi kepada yayasan. Hal ini berdampak pada kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh BPPKAD.

Kata Kunci : PBB P2, Yayasan Pendidikan, Asas Kecermatan.

---

<sup>1</sup> Priwulung, Jalan Wulung Nomor 453, Condongcatur, Depok, Sleman

<sup>2</sup> Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**ANALYSIS OF THE CAUSE FOR NOT EXEMPTING RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX OBJECT FROM EDUCATION FOUNDATION AND THE RELATIONSHIP WITH PRINCIPLE OF CAREFULNESS (CASE STUDY OF YAYASAN PIUS PURWOREJO)**

By

**Delvita Denny Cung<sup>3</sup>, Anugrah Anditya<sup>4</sup>**

**ABSTRACT**

This research aims to find out the causes of negative list of land and building tax of rural and urban areas (PBB P2) exclusion is not applied to Pius Foundation in Purworejo in 2018 and to find out the application of principle of carefulness by Regional Revenue, Finance, and Assets Agency (BPPKAD) in Purworejo in issuance of tax due notification for land and building tax of rural and urban areas in 2018.

This research used normative method which is complemented by field research. It is also supported by secondary data in the form of regulations, literature related to the the questions, and also supported by primary data which obtained from respondents and informants to answer these questions. Those two types of data were processed with descriptive method in order to get explanation.

The result of this study indicated the cause of negative list of land and building tax of rural and urban areas exclusion was not applied to Pius Foundation in Purworejo because during the transition of land and building tax of rural and urban areas, Pratama tax service office did not provide manual and digital data to Regional Revenue, Finance, and Assets Agency. Thus Regional Revenue, Finance, and Assets Agency was doing active data method which was not obtained as needed. Active data collection was not carried out properly because the application for the Agency to get Articles of Association was not delivered to Foundation. Principle of carefulness was not fully applied in the process of issuance of tax due notification for land and building tax of rural and urban areas. It was not fully mistake of the Agency considering there was no implementation or technical instructions to control coordination of the agency with urban village. There was no regulation to control the agency to monitor the delivery of information to the foundation. This had an impact on obligations that should be carried out by the agency

Keywords : Land and Building Tax of Rural and Urban Areas, Education Foundation, Principle of Carefulness

---

<sup>3</sup> Priwulung, Jalan Wulung Number 453, Condongcatur, Depok, Sleman

<sup>4</sup> Master of Public Notary Study, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.